



Usulkan Tarif Naik

150-200%

■ Raperda Parkir Sisakan 4 Bab Bahasan

YOGYA, TRIBUN - Pembahasan mengenai Raperda Penyelenggaraan Perparkiran urung dilaksanakan, Selasa (18/9). Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Perparkiran, Antonius Fokki Ardiyanto menjelaskan, pihak eksekutif belum mampu menghadirkan dengan lengkap para pemangku kepentingan terkait yang terlibat dalam pembahasan tersebut.

Fokki menjelaskan, bahwa sebenarnya Raperda hancuran 2017 tersebut telah menyisakan 4 bab terakhir. Bab tersebut meliputi pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, dan penutup.

"Kami butuh rumusan perkiraan kenaikan tarif berapa dan kawasan mana saja dari Dinas Perhubungan. Namun berkas tersebut sampai sekarang belum sampai di meja kami (pansus)," terangnya ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/9). Mengenal tarif, lanjut-



Kami butuh rumusan perkiraan kenaikan tarif berapa dan kawasan mana saja.

A. Fokki Ardiyanto

nya, pihaknya mengusulkan adanya kenaikan sebesar 150-200 persen. Terkait apakah nantinya diberlakukan tarif progresif atau tarif datar atau flat, pihaknya masih menunggu perhitungan yang dilakukan eksekutif.

"Nilai dan nominal kenaikannya nanti masuk Raperda Retribusi Parkir (turunan dari Raperda induk ini). Raperda penyelenggaraan perparkiran sepatok naik, tapi sebelum Perda ini disahkan, kami minta hitungannya

dulu," ungkapnya.

Ia menambahkan, yang menjadi dasar pihaknya berpikir bahwa tarif parkir sudah seharusnya naik adalah kuantitas kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Selain itu, parkir juga menarik investasi Kota Yogyakarta di bidang perparkiran.

"Selama ini parkir belum dipandang sebagai ladang investasi. Menyamakan persepsi ini yang kadang juga sulit," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Porerwadi mengatakan terkait parkir, tidak dapat dimungkiri bahwa jumlah kendaraan yang melintas dan beraktivitas di kota semakin banyak. Namun, daya tampung parkir tidak besar.

"Dengan melakukan penegakan peraturan kita menghilangkan titik parkir kita. Ini untuk melakukan penataan wajah kota. Potensi parkir kita alihkan dan pindahkan. Ini yang mempengaruhi retribusi parkir sehingga menurun," ujarnya.

Heroe menyebut, kalau Raperda Parkir segera selesai, maka pihaknya akan lebih jelas melakukan perencanaan tentang apa yang dilakukan di 2018-2019.

"Sehingga kami bisa memaksimalkan pendapatan dan pengelolaan parkir. Di Perda itu ada besaran tarifnya. Tarif parkir secara faktual harus naik tapi karena aturan belum ada jadi tidak bisa," ungkapnya. (kur)

Harus Rampung Tahun Ini

KETUA DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko mengatakan, semua raperda harus dirampungkan tahun ini, tak terkecuali raperda perparkiran. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi/Kabupa-

ten/Kota yang menyebutkan bahwa raperda tahun berjalan harus diselesaikan pada tahun itu juga.

"Raperda parkir ini jadi bandul untuk retribusi parkir dan tepi jalan umum. Termasuk dalam pembenahan penataan di ruas Jalan Malioboro. (kur)

Ditanggapi

Diketahui

3 Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005